

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Perdagangan manusia atau human trafficking adalah merupakan tindakan yang mengarah pada kejahatan yang melewati batas negara serta merupakan aktivitas yang melanggar supremasi hak asasi manusia yang tengah gencar didengung-dengungkan di dunia. Perdagangan manusia menjadi permasalahan dan isu yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas serta dilakukan penindakan karena kejahatan model ini sudah berada pada tingkatan yang memperihatinkan. Perdagangan manusia ini tentunya mempengaruhi wanita, pria dan anak-anak.

Indonesia adalah merupakan negara dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi serta menjadi negara sumber dari korban-korban perdagangan manusia yang dikirim ke negara tetangga di wilayah Asia Tenggara khususnya Malaysia. Dengan wilayah yang luas, penduduk yang banyak serta kurangnya keseriusan dari pemerintah serta penegak hukum akan menyuburkan kejahatan model ini untuk terus beroperasi dan menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi sesegera mungkin.

Maka dari itu diperlukan peran semua pihak yang terkait untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia ini, karena sejatinya di era globalisasi saat ini sangat mudah bagi kejahatan model apapun untuk berkembang. Pemberantasan kemiskinan mutlak diperlukan karena inilah pemicu dari adanya perdagangan manusia. Hal ini tentu saja akan sangat berkaitan dengan ketahanan manusia Indonesia. Suatu bangsa akan dapat tumbuh sebagai bangsa yang besar apabila manusia didalamnya memiliki ketahanan terhadap penghidupannya dan tidak terjerumus kedalam tindakan memperdagangkan manusia yang merupakan kejahatan yang sangat keji untuk dilakukan. Manusia bukanlah barang yang dapat diperjual-belikan dan dieksploitasi secara semena-mena.

Oleh karena itu Indonesia memutuskan untuk menjadi salah satu anggota organisasi Internasional yang menangani masalah kejahatan lintas batas salah

satunya perdagangan manusia. Organisasi ini disebut NCB-Interpol yang anggotanya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Interpol adalah dikarenakan sebuah negara tidak mampu mengatasi masalah kejahatan lintas batas sendiri, sebuah negara membutuhkan sebuah kerjasama dengan negara lain atau sebuah organisasi internasional, selain itu tujuan Indonesia masuk menjadi anggota Interpol adalah untuk menshortcut birokrasi agar memudahkan menyelesaikan masalah perdagangan manusia itu sendiri, Karena birokrasi melalui G to G memakan waktu yang lama.

Dalam mengatasi masalah perdagangan manusia dari Indonesia khususnya ke Malaysia NCB-Interpol memiliki upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi korban perdagangan manusia. Karena NCB-Interpol metargetkan pada tahun 2015 korban perdagangan manusia di Indonesia harus turun. Tapi dilihat dari hasilnya upaya yang dilakukan NCB Interpol tidak berhasil. Karena korban perdagangan orang terus meningkat mungkin diakibatkan dengan semakin terorganisirnya kejahatan perdagangan manusia sehingga sulitnya untuk mengidentifikasi pelaku perdagangan manusia itu sendiri.

#### **IV.2 Saran**

- a. Pemerintah Indonesia harus secara ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku atau jaringan perdagangan manusia di Indonesia dan lebih memaksimalkan kerja sama dengan pihak Interpol. Hal ini mengingat bahwa Modus operandi sindikat perdagangan manusia dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih sehingga dengan mudah memasuki suatu negara oleh karena itu setiap aparat penegak hukum harus lebih cerdas dan lebih sigap dalam hal mengantisipasi masalah ini.
- b. Kerjasama antara NCB-Indonesia, Bareskrim Polri dan lembaga terkait masalah perdagangan manusia dalam penggunaan MST-Message” dan sistem jaringan “I-24/7” harus lebih di tingkatkan. Pemanfaatan teknologi dari Interpol ini perlu lebih di tingkatkan mengingat dari kedua cara tersebut, Baik pemerintah Indonesia lewat Imigrasi atau bareskrim Polri dapat mengetahui update perkembangan pola atau modus serta sindikat

perdagangan orang di dunia Internasional sehingga tidak ketinggalan update bahkan dapat merumuskan tindakan yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya perdagangan manusia.

- c. NCB Indonesia harus menambah staff operasional agar lebih mengoptimalkan kinerja dari NCB-Indonesia. Hal ini mengingat bahwa jumlah staff yang berada di NCB-Indonesia sangat terbatas, perlu menambah jumlah staff yang sesuai dengan bidangnya sehingga kinerja dari NCB-Indonesia bisa lebih efektif dibandingkan saat ini.

